



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

INDONESIA

PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN DESENTRALISASI



Photo: DDG Office

"Lihatlah lebih dekat. Pikirkan lebih dalam. Dengarkan. Pilih."

TANTANGAN

Masa-masa sentralisasi pemerintah otoriter sampai 1998, turut memperlemah lembaga demokrasi dan ketidaksiapan untuk melaksanakan reformasi yang sesungguhnya.

Partai-partai politik tidak berjalan seperti yang diharapkan pada awalnya dalam menyediakan saluran yang demokratis dan efektif untuk memenuhi tuntutan masyarakat pendukungnya.

Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang besar seperti korupsi dan konflik menambah kekecewaan masyarakat.

TUJUAN

Memperkuat agenda reformasi

Memperluas pemerintahan daerah yang partisipatif, efektif dan bertanggungjawab.

Menangani konflik dan mendorong keberagaman

TINJAUAN

Pemerintah Amerika Serikat menyediakan \$195 juta selama lima tahun (2004-2005) untuk membantu pemerintah daerah dan organisasi masyarakat madani dalam rangka membangun pemerintahan daerah yang efektif dan bertanggung jawab, menanggapi konflik dan mendorong keberagaman, serta untuk mengkonsolidasi agenda reformasi yang demokratis.

PROGRAM-PROGRAM

PROGRAM TATA PEMERINTAHAN DAERAH

Local Governance Support Program (LGSP) akan bekerja sama dengan 100 pemerintah daerah untuk memperkuat proses legislasi di tingkat lokal, untuk mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang strategis, dan meningkatkan pelayanan agar lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui perencanaan partisipatif, penganggaran berbasis kinerja serta pengelolaan keuangan. LGSP akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, asosiasi pemerintah daerah dan organisasi masyarakat madani demi meningkatkan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal, dan memperbaiki komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjamin adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban.

KONSOLIDASI REFORMASI YANG DEMOKRATIS

Democratic Reform Support Program (DRSP) akan mendukung kelompok dari sektor publik maupun swasta, dan masyarakat madani yang melakukan advokasi dalam memajukan serta menjaga reformasi yang demokratis termasuk bidang peraturan hukum, kebebasan memperoleh informasi, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta desentralisasi. DRSP akan mendorong pengembangan suatu kerangka pemilihan langsung kepala daerah, memberi bantuan teknis kepada lembaga-lembaga pemerintah dalam rangka perbaikan pelaksanaan perundang-undangan desentralisasi, membangun kemampuan pemerintah daerah/asosiasi legislatif sebagai pendukung desentralisasi yang efektif, mendukung upaya pemberantasan korupsi di daerah dan kegiatan dalam rangka otonomi khusus di Aceh dan Papua. Mitra-mitra yang tergabung dalam program Consortium for Electoral and Political Processes (CEPPS) akan membantu anggota legislatif di tingkat lokal dan nasional, serta dewan perwakilan daerah untuk melaksanakan reformasi yang demokratis melalui partai politik. Program baru di bidang Penegakan Hukum juga akan dikembangkan untuk mendukung usaha-usaha reformasi hukum dan pemberantasan korupsi.

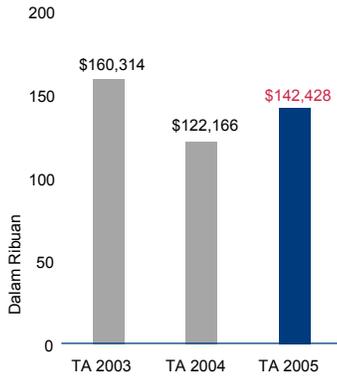
DUKUNGAN UNTUK DEMOKRATISASI YANG DAMAI

Support for Peaceful Democratization Program (SPD) akan membantu organisasi-organisasi di daerah dalam menghadapi konflik kekerasan di Indonesia. SPD akan memusatkan pada lima bidang: pelatihan tentang masalah konflik dan penanganannya; pengembangan kemampuan di bidang hubungan sipil-militer; pengembangan mata pencaharian di daerah konflik; pembuatan serta pemantauan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanganan konflik; serta bantuan darurat bagi mereka yang terkena dampak



PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN DESENTRALISASI

BANTUAN USAID KEPADA INDONESIA



Pendanaan: Kelangsungan Hidup Anak dan Kesehatan, Bantuan Pembangunan, Dukungan Ekonomi, PL 480 Title II (Termasuk bantuan pangan darurat & non darurat)

TA 2005 Anggaran untuk Demokrasi dan Pemerintahan
Persentase Untuk Tiap Bidang Program



Pada Tahun Anggaran 2005 dana untuk Demokrasi dan Pemerintahan sebesar: \$35,000,000

konflik. Fokus utama dalam program ini adalah propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BEBERAPA POKOK KEBERHASILAN PROGRAM

Indonesia telah mencapai tonggak sejarah yang sangat penting dalam melaksanakan transisi demokrasi yang sedang berjalan, dengan berhasilnya pemilihan anggota legislatif di tingkat lokal dan nasional, serta pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kali. Dengan 155 juta pemilih terdaftar dan lebih dari 575.000 tempat pemungutan suara, pemilu di Indonesia merupakan pemilu paling besar di dunia yang dilaksanakan dalam waktu satu hari saja. USAID merupakan lembaga donor bilateral, yang terbesar dengan menyediakan \$25,2 juta untuk mendukung secara langsung pemilu Indonesia, pemantauan oleh masyarakat madani serta pelatihan pasca pemilu.

Dengan bantuan dari USAID, Mahkamah Agung telah membuat dan melaksanakan cetak biru untuk reformasi menyeluruh, termasuk mengurangi jumlah kasus yang belum tertangani, memperbaiki kualitas serta integritas para hakim, menerbitkan keputusan-keputusan pengadilan serta memodernisasi sistem informasi pengadilan.

Bantuan USAID memegang peranan yang sangat penting dalam membantu Departemen Keuangan untuk mengembangkan dan melaksanakan rumus dan teknik bagi hasil yang menjamin kesinambungan dana untuk pemerintah daerah, serta memegang peran penting dalam membantu Departemen Dalam Negeri untuk memperkuat kerangka hukum dan peraturan bagi pemerintah daerah.

Dengan bantuan USAID ini, asosiasi lembaga pemerintah daerah telah menunjukkan kemampuan mereka sebagai pendukung reformasi yang efektif yang memperkuat kerangka hukum untuk pemerintah daerah yang demokratis dan bertanggung jawab.

Tidak lama setelah terjadinya bencana tsunami di Aceh, program SPD (Support for Peaceful Democratization) memberikan 40 hibah untuk membantu program padat karya (cash-for-work) dan pengembangan mata pencaharian (livelihood). Sebanyak 23 program padat karya (cash-for-work) melibatkan 24.624 pekerja dengan dana sebesar \$2,1 juta diberikan kepada pekerja tersebut. Selain itu, ada 17 hibah untuk membantu membuka kembali kesempatan kerja dengan program pengembangan mata pencaharian. USAID juga memberikan bantuan agar pelayanan oleh pemerintah lokal terbuka kembali dan bantuan untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain memberi tanggapan cepat terhadap konflik dan krisis yang ada, bantuan USAID berlanjut kepada sasaran jangka panjang untuk mengurangi konflik serta perubahan pada masyarakat. Di Maluku dan Sulawesi Tengah, sekitar 120.000 pemuda di daerah rawan kekerasan dilibatkan dalam kegiatan pelatihan tentang perdamaian.

INFORMASI

Betina Moreira
Outreach & Communications
USAID/Indonesia
Tel: 3435-9424
Email: bmoreira@usaid.gov

www.usaid.gov/id